

TESIS

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN
MINYAK ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



AHMAD ADI WIJAYA

No. Mhs.: 215214475

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024**





UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : Ahmad Adi Wijaya
Nomor Mahasiswa : 215214475
Konsentrasi : Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam
Judul Tesis : KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN MINYAK ILEGAL
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Disetujui oleh :

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
1. Dr. D. Krismantoro, S.H., M.HUM.	
2. Dr. Hyronimus Rhit, S.H., LL.M.	22/07/2024	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : AHMAD ADI WIJAYA
Nomor Mahasiswa : 215214475
Konsentrasi : Pengelolaan Sumber Daya Alam
Judul Tesis : KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN MINYAK
ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 29/7/2024

Dewan Penguji	Nama	Tanda tangan
1. Ketua	Dr. D. <u>Krisnantoro</u> , S.H., M.Hum	
2. Sekretaris	Dr. Hyranimus Rheti, S.H., LL.M	
3. Anggota	Dr. W. Riawan-Tjandra, S.H., M.Hum	

Ketua Program Studi

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Ti Anita Christiani, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Adi Wijaya

No.Mahasiswa : 215214475

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN DAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN
MINYAK ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma jaya Yogyakarta.

Sleman, 22 Juni 2024

Yang menyatakan:

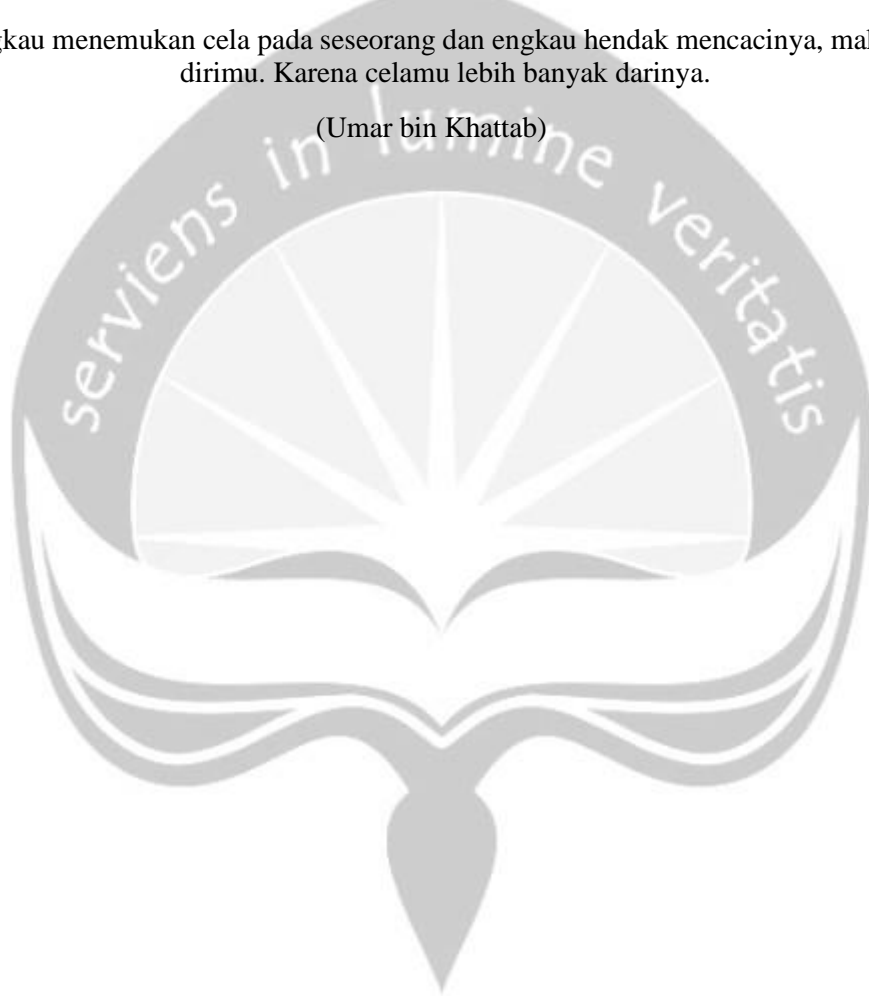


AHMAD ADI WIJAYA

HALAMAN MOTO

Jika engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu. Karena celamu lebih banyak darinya.

(Umar bin Khattab)



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN MINYAK ILEGAL** pada Program Studi Magister Hukum. Penulisan tesis ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta. Penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari jasa-jasa yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kepada Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Kepada Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisa hukum/tesis ini dapat selesai.
3. Bapak Drs. Apriyadi, M.Si Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Humas PT. Petro Muba yang telah berkenan di wawancara dan memberikan jawaban mengenai pertanyaan yang diajukan sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini
4. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kepada Orang Tua saya dan Adik-adik saya.
6. Kepada Pacar saya Putri Natalia sinaga yang telah memberikan waktu dan tenaga nya untuk membantu saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Yogyakarta, 29 Juli 2024

Penulis

Ahmad Adi Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Peneltian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	
1. Kewenangan Pemerintah Daerah	16
a. Pengertian Kewenangan.....	16
b. Sumber kewenangan	18
c. Perbedaan Atribusi, Delegasi dan Mandat	18
d. Unsur Kewenangan.....	19
2. Pemerintahan	20
3. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	21

4. Pemerintah Daerah	22
a. Asas Pemerintah Daerah	26
b. Tujuan Pemerintah Daerah	26
c. Otonomi Daerah	27
d. Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara	29
5. Pertambangan Minyak Ilegal	
a. Pengertian Pertambangan.....	34
b. Jenis-jenis Tambang.....	34
c. Tujuan Pertambangan	36
d. Pengertian Minyak dan Gas Bumi	37
e. Pertambangan Minyak	37
6. Pengawasan dan Penegakan Hukum	39
F. Landasan Teori	
1. Teori Kewenangan	43
2. Teori Penegakan Hukum.....	45
G. Batasan Konsep.....	
1. Kewenangan	46
2. Pemerintah Daerah.....	47
3. Pengawasan	48
4. Penegakan Hukum	48
5. Pertambangan minyak ilegal.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Bahan	50

1. Data Primer	50
2. Data Sekunder	51
C. Lokasi	51
D. Narasumber dan Responden.....	51
E. Cara Pengumpulan Data.....	52
F. Langkah-langkah Penelitian.....	52
G. Metode Analisis dan Penarikan Kesimpulan	52
H. Sistematika Laporan Penulisan Tesis.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin	54
B. Gambaran umum Perusahaan Pertambangan Di Kabupaten Musi Banyuasin.....	58
C. Tahapan-Tahapan dan Kondisi Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin	61
D. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penegakan Hukum	
1. Kewenangan Pelaksanaan Pengawasan Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin	65
2. Upaya Penegakan Hukum Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin	68
E. Faktor-Faktor Terjadinya Pertambangan Minyak Ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin	70
F. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pertambangan Minyak Ilegal	
1. Dampak Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Pertambangan Minyak Ilegal	76

2. Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Lingkungan.....	77
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
---------------------	----

B. Sarana	86
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris ditinjau dari teori kewenangan dan penegakan hukum. Sumber datanya adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dan responden dengan wawancara langsung di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan tempat pertambangan minyak ilegal. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisa menggunakan metode kualitatif yang berupa data deskriptif bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pertambangan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 Ayat (1) dan (3) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pertambangan ilegal adalah *pertama*, faktor luas wilayah. *kedua*, faktor ekonomi. *ketiga*, faktor kesadaran hukum masyarakat. *keempat*, faktor kurangnya personil. *Kelima*, faktor aparat penegak hukum.

Kata Kunci : kewenangan, Pemerintah Daerah, Pertambangan Minyak Ilegal.

ABSTRACT

This research analyzes the authority possessed by the regional government in implementing supervision and law enforcement against illegal oil mining in Musi Banyuasin Regency. This thesis aims to find out and examine the implementation of supervision and law enforcement as well as the factors that cause illegal oil mining to occur in Musi Banyuasin Regency. This research is empirical legal research in terms of the theory of authority and law enforcement. The data source is primary data, namely data obtained directly from sources and respondents by direct interviews at the Musi Banyuasin Regency Regional Government Office and illegal oil mining sites. Secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials, analyzed using qualitative methods in the form of written or spoken language descriptive data from the people and perpetrators observed. The results of the research show that the implementation of supervision and law enforcement against illegal oil mining in Musi Banyuasin Regency is not within the authority of the regional government based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government Article 14 Paragraph (1) and (3) relating to the management of oil and natural gas falls under the authority of the central government. The factors that cause illegal mining to occur are first, the area area factor. second, economic factors. third, the factor of public legal awareness. fourth, the lack of personnel factor. Fifth, the factor of law enforcement officers.

Keywords: *authority, Regional Government, Illegal Oil Mining.*